



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan, perubahan organisasi, dan penambahan serta penyesuaian kelas jabatan pada jabatan fungsional, diperlukan perubahan dan penyesuaian jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

- KESATU : Menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan lain yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Perubahan nomenklatur dan penambahan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Menteri Ketenagakerjaan	-
2.	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	-
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA		
3.	Sekretaris Jenderal	17
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	17
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	17
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	17
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	17
8.	Inspektur Jenderal	17
9.	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	17
10.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	16
11.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional	16
12.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	16
13.	Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik	16
14.	Staf Khusus Menteri	16
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
15.	Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	15

16.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15
17.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	15
18.	Kepala Biro Hukum	15
19.	Kepala Biro Umum	15
20.	Kepala Biro Kerja Sama	15
21.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
22.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	15
23.	Kepala Pusat Pasar Kerja	15
24.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	15
25.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	15
26.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	15
27.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	15
28.	Direktur Bina Peningkatan Produktivitas	15
29.	Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	15
30.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	15
31.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	15
32.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	15
33.	Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	15
34.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	15
35.	Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	15
36.	Direktur Bina Pengantar Kerja	15
37.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
38.	Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan	15
39.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15

40.	Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	15
41.	Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	15
42.	Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial	15
43.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
44.	Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	15
45.	Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
46.	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	15
47.	Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
48.	Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
49.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
50.	Inspektur I	15
51.	Inspektur II	15
52.	Inspektur III	15
53.	Inspektur IV	15
54.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	15
55.	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	15
56.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	15
57.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	15
58.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan	14
59.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang	14
60.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi	14
61.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung	14

62.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang	14
63.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar	14
64.	Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat	14
65.	Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta	14

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
JABATAN ADMINISTRATOR		
1.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Banda Aceh	13
2.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Padang	13
3.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Surakarta	13
4.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Samarinda	13
5.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Kendari	13
6.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Ternate	13
7.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Ambon	13
8.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Sorong	13
9.	Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi	13

10.	Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari	13
11.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar	13
12.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan	13
13.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung	13
14.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda	13
15.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Bandung Barat	12
16.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Lombok Timur	12
17.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Bantaeng	12
18.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Sidoarjo	12
19.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Banyuwangi	12
20.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Belitung	12
21.	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Pangkajene dan Kepulauan	12
22.	Kepala Bagian Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	12
23.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum	12
24.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum	12
25.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum	12
26.	Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	12
27.	Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pasar Kerja	12
28.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	12

29.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	12
30.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	12
31.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	12
32.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Inspektorat Jenderal	12
33.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	12
34.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	12
35.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan	11
36.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang	11
37.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi	11
38.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung	11
39.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang	11
40.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar	11
41.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat	11
42.	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta	11

JABATAN PENGAWAS		
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	9
44.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	9
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	9
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum	9
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum	9
48.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kerja Sama	9
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat	9
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri, Biro Umum	9
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli, Biro Umum	9
52.	Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum	9
53.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	9
54.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	9
55.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	9
56.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	9
57.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas	9
58.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	9
59.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	9

60.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	9
61.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	9
62.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja	9
63.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	9
64.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Pengantar Kerja	9
65.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9
66.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan	9
67.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9
68.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	9
69.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	9
70.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial	9
71.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9
72.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	9
73.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9
74.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	9

75.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9
76.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9
77.	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	9
78.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I	9
79.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II	9
80.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III	9
81.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV	9
82.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	9
83.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	9
84.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	9
85.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	9
86.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Banda Aceh	9
87.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Padang	9
88.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Surakarta	9
89.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Samarinda	9
90.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Kendari	9
91.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Ternate	9

92.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Ambon	9
93.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Sorong	9
94.	Kepala Subbagian Umum, Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi	9
95.	Kepala Subbagian Umum, Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari	9
96.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Bandung Barat	9
97.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Lombok Timur	9
98.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Bantaeng	9
99.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Sidoarjo	9
100.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Banyuwangi	9
101.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Belitung	9
102.	Kepala Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Pangkajene dan Kepulauan	9
103.	Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar	9
104.	Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan	9
105.	Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung	9
106.	Kepala Subbagian Umum, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda	9
107.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Politeknik Ketenagakerjaan	9

108.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Politeknik Ketenagakerjaan	9
JABATAN PELAKSANA		
Rumpun Bidang Perencanaan dan Pelaporan		
109.	Analisis Manajemen Risiko	7
110.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
111.	Analisis Perencanaan	7
112.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
113.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
114.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
115.	Analisis Kinerja	7
116.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
117.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
118.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
119.	Pengelola Bahan Perencanaan	6
120.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6
Rumpun Bidang Keuangan dan Pengawasan Internal		
121.	Analisis Aset Negara	7
122.	Analisis Barang Milik Negara	7
123.	Analisis Kerugian Negara	7
124.	Analisis Keuangan	7
125.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7
126.	Analisis Laporan Keuangan	7
127.	Analisis Pelaksanaan Anggaran	7
128.	Analisis Perbendaharaan	7
129.	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	7
130.	Penata Laporan Keuangan	7
131.	Penelaah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	7
132.	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	7
133.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7

134.	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7
135.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6
136.	Pengadministrasi Keuangan	6
137.	Pengelola Anggaran	6
138.	Pengelola Barang Milik Negara	6
139.	Pengelola Data PNB	6
140.	Pengelola Data Temuan Pengawasan	6
141.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6
142.	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	6
143.	Pengelola Kerugian Negara	6
144.	Pengelola Keuangan	6
145.	Pengelola Laporan Keuangan	6
146.	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	6
147.	Pengolah Daftar Gaji	6
148.	Pengolah Data Perbendaharaan	6
149.	Pranata Laporan Keuangan	6
150.	Verifikator Anggaran	6
151.	Verifikator Keuangan	6
152.	Pelaksana Sistem Pengendalian Internal	5
Rumpun Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi, dan Tatalaksana		
153.	Analisis Diklat	7
154.	Analisis Jabatan	7
155.	Analisis Kelembagaan	7
156.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
157.	Analisis Organisasi	7
158.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7
159.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7

160.	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7
161.	Analisis Program Diklat	7
162.	Analisis Tata Laksana	7
163.	Penyusun Rencana Mutasi	7
164.	Pengadministrasi Kepegawaian	6
165.	Pengelola Disiplin Pegawai	6
166.	Pengelola Kepegawaian	6
167.	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan	6
Rumpun Bidang Hukum		
168.	Analisis Advokasi Hukum	7
169.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7
170.	Analisis Produk Hukum	7
171.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7
172.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7
173.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	7
174.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
175.	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6
176.	Pengolah Data Informasi dan Hukum	6
Rumpun Bidang Umum dan Perlengkapan		
177.	Analisis Layanan Umum	7
178.	Analisis Protokol	7
179.	Penyuluh Kearsipan	7
180.	Penyuluh Obat dan Makanan	7
181.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
182.	Perancang Interior	7
183.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
184.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6

185.	Pengelola Bangunan Gedung	6
186.	Pengadministrasi Persuratan	6
187.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	6
188.	Pengadministrasi Umum	6
189.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6
190.	Pengelola Gudang	6
191.	Pengelola Poliklinik	6
192.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6
193.	Petugas Protokol	6
194.	Pranata Barang dan Jasa	6
195.	Pranata Kearsipan	6
196.	Sekretaris	6
197.	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	6
198.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6
199.	Petugas Keamanan	5
200.	Komandan Petugas Keamanan	5
201.	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5
202.	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	5
203.	Pengemudi	5
Rumpun Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama		
204.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
205.	Analisis Humas	7
206.	Analisis Pengawasan Masyarakat	7
207.	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7
208.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
209.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7
210.	Analisis Kerja Sama	7
211.	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7
212.	Analisis Konvensi Internasional	7
213.	Jurnalis	6

214.	Pengelola Layanan Kehumasan	6
215.	Pengelola Pengaduan Publik	6
216.	Pengelola Administrasi Kerjasama Luar Negeri	6
Rumpun Bidang Sistem Informasi dan Dokumen		
217.	Analisis Data dan Informasi	7
218.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
219.	Pengelola Database	6
220.	Pengelola Dokumentasi	6
221.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6
Urusan Lainnya		
222.	Analisis Kerjasama Pendidikan	7
223.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
224.	Analisis Mutu Akademik	7
225.	Analisis Peserta Didik	7
226.	Analisis Tata Usaha	7
227.	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis	7
228.	Penyusun Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar	7
229.	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7
230.	Penyusun Naskah	7
231.	Analisis Kemahasiswaan	7
232.	Pengelola Data Alumni	6
233.	Pemeriksa Bahan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi	6
234.	Pengadministrasian Kerjasama Pelatihan	6
235.	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	6
236.	Pengelola Asrama	6
237.	Pengelola Laboratorium	6
238.	Pengelola Penelitian	6
239.	Pengelola Sertifikasi	6
240.	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	6

241.	Pramu Kelas	5
Rumpun Bidang Pelatihan dan Produktivitas		
242.	Analisis Bahan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	7
243.	Analisis Bahan Pengembangan Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	7
244.	Analisis Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan	7
245.	Analisis Bahan Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan	7
246.	Analisis Bahan Peningkatan Produktivitas	7
247.	Analisis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan	7
248.	Analisis Bahan Regulasi Sertifikasi, Advokasi, dan Sertifikasi Kompetensi	7
249.	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	6
Rumpun Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		
250.	Analisis Bahan Pelayanan Antar Kerja	7
251.	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	7
252.	Analisis Bahan Pengembangan Informasi Pasar Kerja	7
253.	Analisis Bahan Pengembangan Model Kesempatan Kerja	7
254.	Analisis Bahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	7
255.	Analisis Bahan Penyuluhan, Bimbingan Jabatan, dan Perantaraan Kerja	7
256.	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	6
Rumpun Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
257.	Analisis Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	7
258.	Analisis Bahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7
259.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial	7
260.	Analisis Bahan Pengupahan	7

261.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7
262.	Analisis Bahan Persyaratan Kerja	7
263.	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	6
Rumpun Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
264.	Analisis Bahan Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
265.	Analisis Bahan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	7
266.	Analisis Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
267.	Analisis Bahan Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial	7
268.	Analisis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	7
269.	Analisis Bahan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
270.	Analisis Bahan Standar dan Sumber Daya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
271.	Penguji Hiperkes	7
272.	Pengelola Bahan Pelayanan Teknis Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6
273.	Pengelola Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6
Rumpun Bidang Ketenagakerjaan Lainnya		
274.	Analisis Bahan Pemberdayaan dan Penyelenggaraan	7
275.	Analisis Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis	7
276.	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja	7
277.	Analisis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia	7
278.	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	7
279.	Analisis Tenaga Kerja	7
280.	Konselor	7

281.	Pengelola Bahan Pemberdayaan dan Penyelenggaraan	6
282.	Pengelola Penempatan TKI	6
283.	Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	6
284.	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	6
285.	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	6

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA JABATAN		KELAS JABATAN
1	2		3
1.	ANALIS KEBIJAKAN:		
	1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
	2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
	3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
	4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
2.	ANALIS KEPEGAWAIAN/ANALIS SDM APARATUR:		
	5.	Analisis Kepegawaian Ahli Utama/Analisis SDM Aparatur Ahli Utama	14
	6.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
	7.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
	8.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
3.	APOTEKER:		
	9.	Apoteker Ahli Madya	11
	10.	Apoteker Ahli Muda	9

	11.	Apoteker Ahli Pertama	8
4.	BIDAN (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	12.	Bidan Ahli Madya	11
	13.	Bidan Ahli Muda	9
	14.	Bidan Ahli Pertama	8
	15.	Bidan Penyelia	8
	16.	Bidan Mahir	7
	17.	Bidan Terampil	6
	18.	Bidan Pemula	5
5.	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR:		
	19.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
	20.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
	21.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
	22.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
6.	ARSIPARIS (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	23.	Arsiparis Ahli Utama	13
	24.	Arsiparis Ahli Madya	11
	25.	Arsiparis Ahli Muda	9
	26.	Arsiparis Ahli Pertama	8
	27.	Arsiparis Penyelia	8
	28.	Arsiparis Mahir	7
	29.	Arsiparis Terampil	6
7.	AUDITOR (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	30.	Auditor Ahli Utama	14
	31.	Auditor Ahli Madya	12
	32.	Auditor Ahli Muda	10
	33.	Auditor Ahli Pertama	8
	34.	Auditor Penyelia	9
	35.	Auditor Mahir	7
	36.	Auditor Terampil	6

8.	AUDITOR KEPEGAWAIAN:		
	37.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya	11
	38.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	9
	39.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	8
9.	DOKTER:		
	40.	Dokter Ahli Utama	14
	41.	Dokter Ahli Madya	12
	42.	Dokter Ahli Muda	10
	43.	Dokter Ahli Pertama	9
10.	DOKTER GIGI:		
	44.	Dokter Gigi Ahli Utama	14
	45.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
	46.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
	47.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
11.	DOSEN:		
	48.	Dosen Ahli Guru Besar	15
	49.	Dosen Ahli Lektor Kepala	13
	50.	Dosen Ahli Lektor	11
	51.	Dosen Ahli Asisten Ahli	9
12.	INSTRUKTUR (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	53.	Instruktur Ahli Utama	14
	54.	Instruktur Ahli Madya	12
	55.	Instruktur Ahli Muda	10
	56.	Instruktur Ahli Pertama	8
	57.	Instruktur Penyelia	8
	58.	Instruktur Mahir	7
	59.	Instruktur Terampil	6
13.	MEDIATOR:		
	60.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama	14
	61.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	12

	62.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10
	63.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8
14.	PENGANTAR KERJA:		
	64.	Pengantar Kerja Ahli Utama	14
	65.	Pengantar Kerja Ahli Madya	12
	66.	Pengantar Kerja Ahli Muda	10
	67.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	8
15.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN:		
	68.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama	14
	69.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	12
	70.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	10
	71.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	8
16.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA:		
	72.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	12
	73.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10
	74.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
17.	PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA:		
	75.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Utama	14
	76.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Madya	12
	77.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Muda	10
	78.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8
18.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:		
	79.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14
	80.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12
	81.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10
	82.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	9
19.	PERAWAT (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	83.	Perawat Ahli Madya	11
	84.	Perawat Ahli Muda	9

	85.	Perawat Ahli Ahli Pertama	8
	86.	Perawat Penyelia	8
	87.	Perawat Mahir	7
	88.	Perawat Terampil	6
20.	PERAWAT GIGI:		
	89.	Perawat Gigi Penyelia	8
	90.	Perawat Gigi Mahir	7
	91.	Perawat Gigi Terampil	6
	92.	Perawat Gigi Pemula	5
21.	PEREKAYASA:		
	93.	Perekayasa Ahli Utama	14
	94.	Perekayasa Ahli Madya	12
	95.	Perekayasa Ahli Muda	9
	96.	Perekayasa Ahli Pertama	8
22.	PERENCANA:		
	97.	Perencana Ahli Utama	14
	98.	Perencana Ahli Madya	12
	99.	Perencana Ahli Muda	10
	100.	Perencana Ahli Pertam	9
23.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	101.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
	102.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
	103.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	104.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
	105.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
	106.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
24.	PRANATA KOMPUTER (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	107.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
	108.	Pranata Komputer Ahli Madya	11

	109.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
	110.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	111.	Pranata Komputer Penyelia	8
	112.	Pranata Komputer Mahir	7
	113.	Pranata Komputer Terampil	6
25.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR:		
	114.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia/Analisis Kepegawaian Penyelia	8
	115.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir/Analisis Kepegawaian Mahir	7
	116.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil/Analisis Kepegawaian Terampil	6
26.	PUSTAKAWAN (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	117.	Pustakawan Ahli Utama	13
	118.	Pustakawan Ahli Madya	11
	119.	Pustakawan Ahli Muda	9
	120.	Pustakawan Ahli Pertama	8
	121.	Pustakawan Penyelia	8
	122.	Pustakawan Mahir	7
	123.	Pustakawan Terampil	6
27.	STATISTISI (KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN):		
	124.	Statistisi Ahli Madya	11
	125.	Statistisi Ahli Muda	9
	126.	Statistisi Ahli Pertama	8
	127.	Statistisi Penyelia	8
	128.	Statistisi Mahir	7
	129.	Statistisi Terampil	6
28	WIDYAIKWARA:		
	130.	Widyaiswara Ahli Utama	14
	131.	Widyaiswara Ahli Madya	12

	132.	Widyaiswara Ahli Muda	10
	133.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
29.	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA:		
	134.	Analisis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12
	135.	Analisis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10
	136.	Analisis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8
30.	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA:		
	137.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
	138.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
	139.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
31.	PENATA LAKSANA BARANG:		
	140.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
	141.	Penata Laksana Barang Mahir	8
	142.	Penata Laksana Barang Terampil	7
32.	ANALIS ANGGARAN:		
	143.	Analisis Anggaran Ahli Utama	14
	144.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
	145.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	146.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
33.	ANALIS HUKUM:		
	147.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
	148.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
	149.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
34.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN:		

	150.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14
	151.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
	152.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
	153.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
36.	PENERJEMAH:		
	158.	Penerjemah Ahli Utama	13
	159.	Penerjemah Ahli Madya	11
	160.	Penerjemah Ahli Muda	9
	161.	Penerjemah Ahli Pertama	8
37.	TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN:		
	162.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	8
	163.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	7
	164.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	6
	165.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula	5

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN LAIN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1	Direktur Politeknik Ketenagakerjaan	15
2	Pembantu Direktur Politeknik Ketenagakerjaan	12

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH